

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA AKADEMIK

Siti Romlah

Sekolah Tinggi Agama Islam Pancawahana Bangil

Abstract: In the face of the industrial revolution era (4.0), directed towards improving human resources, especially in facing Digitalisation, and changes in all aspects of life, various references have been set in government regulations as strategic guidelines for improving the quality of human resources, so that they are in accordance with the needs in the era of industrial revolution. The quality of academic human resources is covering all aspects of human personality, which includes aspects of knowledge, skills, mental attitude, insight and orientation, work ethic, and so on, without forgetting the spiritual dimension needed to increase the dignity and human dignity, in other words personality the whole. Our people, perfect human beings who are skilled in carrying out their duties in the era of the industrial revolution (4.0).

By not losing his spiritual dignity and dignity, that is individuals who have freedom, have their human rights, creative rights, the right to disagree, the right to believe in religion, so that in turn the culture of Indonesian society will develop. "So that each person is possible to reach the level of" the gentlemen of culture ", especially in the spiritual dimension, in this section efforts to improve the quality of academic human resources, especially in the organization of higher education. To compensate for the growing tendency towards demoteric oriented education, to pursue the growth of industrialization by strengthening the competitiveness of digitalization mastery, with all the possible access it creates, as an implication of increasingly advanced societies in all aspects of life as developed countries, their negative impacts among other things, giving rise to human alliances, dehumanization tendencies, vulgarism, consumerism and so on.

Keywords: Superior Human Resources

PENDAHULUAN

Berikut ini kita ikuti bagaimana pokok-pokok pikiran dan orientasi garis-garis besar haluan negara dalam memproyeksikan kualitas sumber daya manusia, sebagai syarat tercapainya masyarakat revolusi industri (4.0), sebagai modal dasar dan factor yang dominan dengan meningkat kualitas sumber daya manusia unggul, pengaruh terhadap kemajuan suatu bangsa dan negara, serta ikut mendorong proses pembaharuan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.¹

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang semakin pesat, persaingan antar bangsa yang semakin ketat, serta dampak arus globalisasi yang semakin meluas, menuntut pemanfaatan, pengembangan serta penguasaan IPTEK secara lebih tepat, cepat dan cermat serta bertanggungjawab agar mampu memacu pembangunan menuju terwujudnya masyarakat yang mandiri, dan maju serta sejahtera.

Untuk mencapai sasaran terciptanya kualitas sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, dan maju dengan produktif serta profesional, iklim usaha yang sehat dan pemanfaatan IPTEK sehingga dapat terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya tercapai kemampuan nasional dalam pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan IPTEK dibutuhkan bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban, serta ketangguhan daya saing bangsa., mempercepat proses peningkatan kecerdasan bangsa, mempercepat proses pembaharuan, peningkatan produktivitas dan efisiensi, memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas, harkat dan martabat bangsa.²

Pembangunan dan penerapan IPTEK itu harus didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan, penataan sistem kelembagaan penyediaan prasarana dan sarana penelitian, penerapan dan pengembangan yang memadai. Dalam penyelenggaraannya harus senantiasa memperhatikan serta berpedoman pada nilai-nilai agama, nilai budaya bangsa serta keterbatasan sumberdaya dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Untuk meningkat sumber daya manusia, harus memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan menghargai prestasi, berani bersaing, serta memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan menghargai orang yang lebih tua, budaya belajar, budaya ingin maju, budaya IPTEK serta perlu dikembangkan pranata sosial budaya yang dapat mendukung proses pemantapan budaya bangsa.³

Dari sejumlah kutipan di atas serta beberapa pernyataan yang tidak penulis sebutkan di sini, ternyata bahwa kualitas manusia tak terlepas dari kaitannya dengan

¹ GBHN, dalam ayat 8 dinyatakan bahwa pembangunan IPTEK Telah berhasil memajukan tingkat kecerdasan masyarakat, bangsa dan negara mengembangkan kemampuan bangsa, dan negara

² GBHN pada Bab III mengenai Arah Pembangunan Nasional, dinyatakan lagi mengenai peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan memiliki kemampuan manajemen, serta pentingnya arah pembangunan IPTEK dalam mengambil peran akan mempengaruhi keberhasilan membangun masyarakat yang maju dan mandiri

³ GBHN Dalam Bab IV mengenai Pelita keenam a.l. untuk sektor Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan kebudayaan, dinyatakan bahwa pembangunan budaya nasional perlu diciptakan suasana yang mendorong tumbuh dan berkembangnya sikap kerja keras, disiplin, sikap menghargai prestasi, berani bersaing.

perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta globalisasi, yang dianggap akan sangat berpengaruh pada upaya tercapainya tujuan pembangunan nasional,

Upaya tercapainya tujuan pembangunan nasional pada era industrialisasi (4.0), segi kebudayaan, ternyata diperlukan iklim budaya yang kondusif bagi terwujudnya sifat-sifat sumber daya manusia yang diharapkan menjadi prasyarat bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara.

Dari uraian di atas kita tarik kesimpulan bahwa kulaitas manusia Indonesia sebagai sumber daya manusia unggul yang diharapkan, dijadikan sebagai suatu sarana perubahan mental yang dimotivasi oleh ide-ide baru. Karena itu diperlukan suatu upaya pengarahan dalam upaya peningkatan kualitas SDM dengan perencanaan, diantaranya melalui pendidikan.

PEMBAHASAN

1. Karakteristik Sumber daya manusia unggul
 - a. Meningkatkan kualitas SDM untuk kepentingan yang lebih operasional, maka SDM unggul seharusnya yang lebih terukur (*measurable*).
 - b. Meningkatkan kualitas SDM unggul itu didasarkan atas pemenuhan persyaratan yang diorientasikan kepada keunggulan peranan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 - c. Meningkatkan kualitas SDM unggul, agar dapat memenangkan kompetensi internasional dan memantapkan kemandirian nasional dalam arti yang luas.
 - d. Meningkatkan SDM unggul dalam masyarakat yang telah lebih dahulu mengalami proses modernisasi, industrisional yang telah mencapai perkembangan lebih jauh dalam bidang IPTEK.

Patutlah kita perhatikan pernyataan yang pernah dikemukakan Menristek B.J. Habibi, bahwa angka-angka pertumbuhan ekonomi saja, belum dapat dipakai sepenuhnya untuk tingkat kemakmuran dan kekuatan suatu negara. Saat ini harus disadari bahwa untuk menyongsong era industrialisasi (4.0), kebutuhan dasar manusia bukanlah sekedar karbonhidrat, protein, pakaian, air bersih, perumahan, pelayanan kesehatan saja, melainkan juga suatu tingkat tertentu dari produk-produk yang berupa nilai tambah sumber daya manusianya. Bila kebutuhan yang satu ini terpenuhi, negara akan menjadi makmur dan kuat.⁴

Untuk menjadi SDM yang berkualitas, manusia itu akan mengalami suatu poses mental yang penuh dengan kontroversi, terutama dari segi tata nilai dan penyikapan. Pertama tanpa perubahan sifat manusia dari tahapan yang lebih tradisional menjadi modern, seringkali terjadi adanya keharusan untuk melepaskan cara berpikir dan berperasaan yang telah berpuluh-puluh tahun, mungkin beberapa

⁴ B.J. Habibi, bahwa angka-angka pertumbuhan ekonomi saja, belum dapat dipakai sepenuhnya untuk tingkat kemakmuran dan kekuatan suatu negara. Saat ini harus disadari bahwa untuk menyongsong era industrialisasi (4.0), kebutuhan dasar manusia bukanlah sekedar karbonhidrat, protein, pakaian, air bersih, perumahan, pelayanan kesehatan saja, melainkan juga suatu tingkat tertentu dari produk-produk yang berupa nilai tambah sumber daya manusianya

abad umurnya. Yang kedua, sifat-sifat yang membuat seseorang menjadi berkualitas itu sering tidak nampak sebagai suatu ciri yang netral (disebabkan oleh mengalami perubahan nilai), sehingga sering dirasakan sebagai ciri (dari luar) yang dipaksakan, atau sebaliknya ia “memaksakan” ciri itu keluar, sehingga dianggap menentang kemapanan (*establishment*). Yang ketiga, ciri-ciri yang disebut sebagai kualitas itu yang dimiliki hal-hal baru, yang tidak langsung terasa manfaatnya, karena masih kuatnya latar belakang kemampuan yang merupakan kendala (*constrain factor*).

Kualitas manusia dapat terwujud dalam dua kategori ciri- ciri luar atau eksternal dan ciri-ciri dalam atau internal. Ciri-ciri eksternal dapat berwujud kelembagaan-kelembagan dalam masyarakat seperti: pabrik-pabrik, pusat-pusat penelitian, urbanisasi lembaga pendidikan, gerakan KB, politisasi, komunikasi masa, industrialisasi, mekanisasi dst.

Wujud kelembagaan itu jelas membedakan keadaan masa nenek moyangnya yang masih hidup dalam masyarakat tradisional. ciri eksternal itu sebenarnya lebih tepat dikatakan sebagai latar belakang lingkungan atau setting dari pola kehidupan modern, yang antara lain didorong oleh kemajuan IPTEK. Dalam kenyatannya gambaran setting itu akan merupakan lingkungan hidup alami nanti, namun bisa saja terjadi bahwa pada kota-kota yang terpadatpun masih mungkin terjadi jaringan hubungan manusia yang paling tradisional. Komunikasi masa dapat saja menyebarkan ide-ide dan kearifan yang berasal dari desa-desa yang tradisional.

Pabrik-pabrik masih mungkin saja ada yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip persawahan dan perladangan yang tradisional. Dalam kehidupan politik masih mungkin saja terjadi semacam bentuk rembuk desa yang diperluas, dalam pendidikan masih mungkin terjadi dualisme pendidikan tradisional dan modern yang berdampingan dsb.

Sekalipun dihadapkan pada lingkungan baru orang akan dapat berubah, dan sekalipun yang baru itu pada gilirannya menuntut pada manusia itu cara-cara baru, terjadi, apabila manusia itu telah mengalami perubahan semangat (*spirit*) pada dirinya, yaitu telah memperoleh cara-cara berpikir, cara bersikap serta berkemauan, dan barulah kita bisa menyebut dia sebagai manusia yang berkualitas (SDM unggul).

Dimensi manusiawi sebagai pendukung kebudayaan adalah sangat penting dan menentukan. Kesepakatan nasional untuk meningkatkan sumberdaya manusia telah dibuat. Perkembangan IPTEK untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing produksi, ketahanan dan kemandirian nasional telah disepakati dalam sidang MPR. Kita bersama-sama mempunyai kepentingan untuk mewujudkan cita-cita nasional itu, khususnya mengenai upaya untuk mewujudkan peningkatan SDM unggul. Tanpa arahan yang bersifat direktif yang merupakan penjabaran kualitas, sebagai indikator dan tolak ukur yang jelas dan operasional, bukan mustahil kualitas manusia yang diharapkan itu akan tetap tinggal sebagaimana semboyan saja.

2. Gambaran sebagai pembanding mengenal indikator ciri-ciri manusia yang berkualitas, yang diorientasikan pada industrialisasi (4.0) dan pengembangan IPTEK, ada baiknya dikemukakan di sini suatu hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh

Alex Inkelas dari Lembaga "*Studies On Social and Cultural Aspects of Development*" dari Universitas Havard. Penelitian tersebut mengenai serangkaian sikap dan nilai pada masyarakat yang mengalami proses modernisasi, yang dilakukan di enam negara berkembang, sebagai kesimpulannya dikemukakan adanya sepuluh indikator sikap dan nilai serta perilaku orang modern, yang teruji aktualitasnya dalam praktek kehidupan yang sebenarnya. Kesepuluh ciri tersebut tidak menunjukkan urutan kepentingan dan prioritas melainkan bersifat arbitrer, juga dimaksudkan sebagai urutan sugestif. Dalam keadaan proses modernisasi yang sedang berlangsung pada seseorang tak nampak urutan yang jelas dan tegas, walaupun begitu telah memberikan kesan, bahwa proses modernisasi itu telah menempuh garis haluan yang makin melebar sambil mengalami berbagai nilai dan sikap tersebut dibawah ini masih pada taraf diasumsikan, sebagai kesatuan dan keutuhan faktor yang menentukan kualitas manusianya.⁵

Pertama : unsur pertama adalah kesediaan manusia untuk menerima pengalaman baru dan perubahan. Yang dimaksud di sini adalah suatu alam pikiran (*state of mind*) suatu keadaan psikologis, suatu keadaan batin, dan bukan berwujud aspek teknis atau keterampilan tertentu. Jadi karena itu biasa saja lebih modern dalam semangat, meskipun ia masih bekerja dengan bajak, dari pada seorang di tempat lain yang bekerja dengan traktor. Dengan demikian kesediaan untuk mengalami hal-hal dan cara-cara melakukan sesuatu yang baru dapat diungkapkan dalam berbagai bentuk, pelayanan kesehatan, penggunaan bibit baru dan pupuk, transportasi, kesediaan beralih pada sumber informasi, perubahan cara mendidik anak dst.

Kedua : tema kedua membawa kita pada dunia opini. Dalam hal ini adanya kesanggupan untuk membentuk atau mempunyai pendapat sendiri pada sejumlah persoalan, bukan yang hanya timbul di sekitarnya, juga persoalan yang timbul di luar lingkungannya. Makin berkualitas seseorang, semakin besar pula kesediannya untuk mengajukan pendapat mengenai negaranya.

Ketiga : tanggapannya mengenai dunia opini lebih bersifat demokratis. Ia sangat sadar akan keragaman sikap dan opini di sekitarnya, dan tidak menutup diri dan menyangka bahwa semua orang harus sependapat dengannya mengenai sesuatu atau hal. Ia bersedia menerima perbedaan pendapat, tanpa merasa perlu secara tegas apriori menolaknya, hanya karena kekuatirannya akan kehancurannya pandangan hidupnya sendiri. Ia tidak akan menghadapi perbedaan opini dengan cara otokratis atau hirarkis. Ia tidak segera menerima ide dari orang yang lebih tinggi kedudukannya.

Keempat : pandangannya terhadap waktu terorientasikan pada masa kini dan masa depan. Ia menyadari akan pentingnya penjadwalan waktu, yang berarti ia peduli

⁵ Philip G. Alt bach, *Higher Educational In Advanced Developing Countries*, Prospects, quarterly review of Education, Vol. XII .No. 3, 1982, UNISCO.

akan efisiensi. Orientasinya ke masa depan, bukan kemasa lampau, peduli pada ketetapan dan ketepatan waktu.

Kelima : menganggap penting suatu perencanaan dalam bekerja. Perencanaan dan pengorganisasian dianggapnya sebagai kewajaran dalam bekerja, dan dalam kehidupan pribadinya.

Keenam : mempunyai keyakinan akan kemampuan manusia. Yakin bahwa manusia mampu membelajarkan diri. Untuk menguasai alam dan membudidayakannya, bukan sebaliknya ia dikuasai oleh alam. Ia yakin bisa merekayasa alam.

Ketujuh : ia mempunyai keyakinan bahwa keadaan dapat diperhitungkan. Ia yakin bahwa manusia dan lembaga lain dapat diharapkan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya. Ia tidak mengakui bahwa setiap hal ditentukan oleh sang nasib. Ia percaya akan adanya tatanan dunia yang cukup tertib.

Kedelapan : punya rasa harga diri, tetapi juga sadar akan harga diri orang lain dan bersedia menghargainya. Hal ini terutama pada sikapnya terhadap wanita dan anak-anak (mereka yang berkedudukan lebih rendah).

Kesembilan : orang berkualitas percaya pada kemanfaatan ilmu dan teknologi, sekalipun dalam bentuk yang paling sederhana.

Kesepuluh : mereka yakin dan percaya akan adanya keadilan dan pembagian. Ganjaran harus diberikan sesuai dengan prestasi, sebaliknya sangsi harus diberikan sebagai resiko tanggung jawab. (*reward and punishment system*). Tindakan harus diberikan atas pertimbangan pribadi yang tak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan.

Demikianlah, sekalipun masih mungkin bisa diperpanjang ilustrasinya, namun kiranya untuk bisa memberikan gambaran umum pada yang disebut sebagai sifat-sifat kulaitas SDM unggul. Ciri-ciri tersebut ditekankan sebagai tema yang sangat erat hubungannya dengan kesanggupan seseorang untuk berhasil menyesuaikan diri sebagai warga dari suatu negara industri modern, dimana IPTEK sangat menentukan. Dengan ciri-cirinya yang beraspek mental tersebut, sangat dimungkinkan terjadinya perilaku yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri, yang berorientasi pada kemajuan IPTEK.

Selanjutnya sebagaimana halnya dengan faktor-faktor yang secara paling cepat dan efektif menimbulkan pada rakyat perubahan mengenai sikap-sikap, nilai-nilai, kebutuhan dan cara-cara bertindak yang paling cocok bagi mereka dalam suatu masyarakat yang modern. Hal itu tak dapat diterangkan dengan satu ciri saja, melainkan dengan sejumlah sifat dan begitu juga pendorongnya tak dapat ditentukan oleh hanya dengan satu faktor saja, melainkan sekumpulan faktor yang merubah seseorang dari tradisional menjadi modern. Diantaranya sejumlah faktor yang tersebut di bawah ini, faktor pendidikanlah yang dianggap sebagai terpenting (yang nanti akan kami uraikan lebih lanjut).

Pendidikan, pada hampir penelitian, disepakati mempunyai pengaruh yang efektif untuk mengubah perilaku seseorang. Memang ada catatan dalam hal ini, bahwa masyarakat yang miskin, seringkali menghasilkan pendidikan yang kurang

baik dan karena beban-beban yang harus dipikul oleh orang tua murid, menyebabkan terputusnya pendidikan anaknya.

Selanjutnya kota telah menunjukkan pula pengaruhnya yang kuat dalam perubahan sikap manusia. Kota merupakan input yang mengharuskan orang memakai cara-cara baru. Kota telah menghadapkan manusia pada sejumlah cara hidup yang beragam, sejumlah opini dan ide, pertambahan mobilitas, berbagai sumber informasi yang kompleks, kota mempercepat proses perubahan. Kota juga memberikan peluang untuk seseorang lepas dari ikatan kewajiban dan hambatan yang terdapat di desa, juga hambatan primordial, dalam suatu masyarakat yang masih padu.

Faktor lain adalah komunikasi masa. Hampir semua penelitian berkesimpulan bahwa masyarakat yang dihadapkan pada komunikasi masa milik lebih banyak sikap modern. Karena diperlukan syarat hanya dapat membaca, maka banyak manusia yang dapat terpengaruh oleh media masa ini.

Patut disebutkan sumber modernisasi lain di sini, yakni negara nasional (*nation state*), dengan segala kelengkapannya, yaitu perlatan pemerintah dan birokrasinya kelembagaan politik, serta kelembagaan militer. Semakin masyarakat dimobilisasi, semakin setia pemerintahnya pada perkembangan dan terdesiminasikan. Peran alat negara terutama militernya dapat memainkan peranan yang penting dalam memperkenalkan modernisasi, contoh dalam manajemen, perencanaan, keterampilan teknik, disiplin, keyakinan diri kuat, dalam berbagai aktifitas kemiliterannya.

Suatu sumber modernisasi lagi yang patut diperhitungkan adalah industri, pabrik, usaha-usaha produktif dan jasa-jasa administratif lainnya. Staf-staf tertentu dari pabrik-pabrik atau industri dalam kebudayaan manapun ia berada. Adanya tenaga fisik dan mekanik, pengolahan bahan dasar, prosedur-prosedur yang teratur dan rutin dalam pengendalian pekerjaan merupakan hal pokok; waktu adalah patokan penting dalam bekerja, kekuasaan dan kewibawaan sering berdasarkan kemampuan teknik, dan ganjaran yang diperoleh sesuai dengan prestasi kerja.

Demikianlah secara pokok-pokok kesimpulan dari penelitian yang pernah dilakukan untuk mengetahui kualitas SDM unggul, yang sedang berdasar pada taraf perkembangan menuju negara industri modern. Agaknya perlu dijadikan bahan perbandingan terutama dalam upaya kita untuk memerankan secara optimal LPT, dalam melaksanakan fungsinya ikut meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, dalam menyongsong pembangunan pada sekarang dan berikutnya

Upaya Meningkatkan SDM Unggul dengan Peran LPT

1. Dengan Strategi Pengembangan Intrinsik Akademik

Perkembangan IPTEK dan pertumbuhan ekonomi serta pengaruh globalisasi ternyata telah membawa dampak yang amat besar terhadap perkembangan masyarakat Indonesia. Sebagai suatu negara yang sedang mengalami perkembangan pesat Indonesia memperlihatkan dirinya sebagai negara yang sedang

menuju kearah perkembangan industri dan mulai sungguh-sungguh mengintroduksi sains dan teknologi. Sementara itu perkembangan IPTEK, ekonomi dan globalisasi tidak jarang telah memperlihatkan dampak lompatan (*leap effect*) yang sangat terasa akibatnya pada perubahan tata cara dan pergeseran nilai dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Akibat dari dampak lompatan yang terjadi karenanya, telah menimbulkan berbagai kontradiksi akibat-akibat sosialnya dalam lingkungan kehidupan. Penyesuaian-penyesuaian terhadap berbagai kemajuan tersebut telah mendorong meningkatkan tuntutan (demand) hidup dan harapan-harapan baru, dengan membawa serta berbagai implikasi dan dampak sampingan dalam berbagai sektor kehidupan idak terkecuali dalam lapangan pendidikan formal maupun non formal.

Dalam era revolusi industri (4.0) telah terjadi peningkatan percepatan (akselerasi) pendidikan secara kuantitatif maupun kualitatif pada semua jenjang pendidikan dalam berbagai bidang dan jenis program, sehingga pengaruhnya sangat terasa juga pada Lembaga Pendidikan Tinggi khususnya. Walaupun secara relatif masih dirasakan adanya kekurangan tenaga pendidik, lebih-lebih bila dilihat dari sudut relevansi bidang studi, penyebaran penugasan. Disamping masalah kuantitatif yang masih menjadi tantangan pendidikan tinggi, lebih terasa pula tantangan dari segi kualitas, etos kerja profesi dan persepsi masyarakat yang belum profesional. Dalam hal ini perlu kita sadari berbagai kenyataan yang harus mendapatkan perhatian, khususnya dalam lingkungan Lembaga PendidikanTinggi sendiri, yakni:

- a. Prosentasi yang rendah dari tenaga pengajar yang tetap yang berkualifikasi tinggi.
- b. Sarana dan prasarana akademik yang masih terbatas.
- c. Kekurangan perpustakaan yang up to date.
- d. Kurang menariknya LPT pada umumnya bagi para calon mahasiswa.
- e. Sehingga kurang kompetitif dalam rekrutmen mahasiswa baru.

Walaupun masih banyak kendala objektif yang dihadapi Lembaga Pendidikan Tinggi, namun kita harus mengakui adanya kemajuan dalam berbagai hal kelengkapan stratanya mulai dari S.0 – S.1 – S.2 dan S.3 telah mulai melembaga secara berangsur-angsur. Begitu pula para dosennya mendapat kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan karirnya melalui berbagai macam pendidikan dan pelatihan. Jumlah bidang studi untuk tingkat Pasca Sarjana juga telah bertambah luas pilihannya. Demikian juga kegiatan lebih terbuka peluangnya. sehubungan dengan fungsinya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui proses pendidikan yang dilakukan, maka yang perlu mendapat perhatian lebih adalah, perubahan yang perlu dilakukan untuk mengubah etos kerja kependidikan, yang meliputi aspek-aspek budaya kehidupan kampus sebagai komunitas akademik, yang meliputi : pemantapan etika profesional pendidikan, pola interaksi dosen mahasiswa, kode etik akademik, dan disiplin kerja pada umumnya. Hal-hal tersebut perlu mendapat perhatian lebih serius, karena merupakan suatu prasyarat yang

mutlak bagi pengembangan pendidikan tinggi khususnya Lembaga Pendidikan Tinggi, sebagai pusat-pusat kebudayaan. Hal itu berarti bahwa pendidikan tinggi harus menjadi sumber gagasan pembaruan, lebih menetapkan diri sebagai “subjek” kebudayaan, lebih dari sekedar menjadi “objek” kebudayaan.

Pemantapan etika profesional, berarti bahwa semua ciri keprofesionalan, harus lebih dimantapkan pelaksanaannya pertama mengenai keahlian, yang membedakan ciri dari pekerjaan yang tak profesional, harus diwujudkan dalam performan kerja nyata. Keahlian kita adalah sebagai pendidik dan guru, yang sebenarnya. Perkembangan ilmunya dalam keutuhan IPTEKnya sudah jauh dan mantap. Tetapi apakah keahlian dalam profesi kita itu telah cukup menerima consent (diterima baik dan ditaati) dari masyarakat. Kita bisa menilai serta merenungkan sendiri, bagaimana kenyataannya masyarakat memberi perlakuan terhadap profesi kependidikan kita ini. Apabila ada perilaku masyarakat yang kita anggap kurang sesuai dengan azas-azas pendidikan, kita perlu mengadakan intropeksi, apakah kita sendiri para pendidik sudah melaksanakan azas-azas pendidikan itu secara taat azas (konsekuen), atau apakah karena persepsi masyarakat sendiri yang memang kurang memahami azas-azas tersebut. Karena bagaimanapun juga suatu gejala budaya, selalu terjadi mealui cara-cara timbal balik, yaitu pelaku budaya itu sebagai objek maupun sebagai subjek. Hal itu penting karena dari perilaku taat azas inilah berawal segala wibawa kependidikan. Wibawa kependidikan bukan sekedar didasarkan atas imbalan materi, karena ia lebih merupakan dimensi etika. Kedua adalah kesejawatan (*corporateness*). Maksudnya adalah bahwa norma-norma kependidikan, sepenuhnya menjadi wilayah kewenangan kolejial, yang bersifat komunal, lebih-lebih untuk hal-hal yang bersifat teknikalitas. Apabila misalnya banyak pihak luar yang ikut campur dalam melaksanakan pendidikan sampai kepada soal-soal yang teknis, itu menjadi pertanda awal, bahwa profesi kependidikan sudah mulai kurang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Perlu dipertanyakan lebih jauh, apakah ada dan seberapa jauh proses evaluasi pendidikan itu diserahkan kepada “mesin” sedangkan yang kita nilai adalah aspek mental manusia, yang segi-seginya kompleks sekali. Dari segi humanisasi segala dampak dari mekanisasi dan masalisasi pendidikan perlu dipertimbangkan dampak negatifnya, disamping segi positifnya. Etika, adalah kode etik, yang menjadi ciri utama dari suatu profesi, karena dari sinilah sumber rasa tanggung jawab itu berasal, yang menjadi kesepakatan. Anggauta profesi, didasari atas suatu landasan falsafah tertentu, punya fungsi instrumental sebagai norma-norma yang ditaati bersama, sebagai “benteng” yang kuat untuk memepertahankan wibawa profesi, dan sebagai dasar kebanggaan anggauta profesi. Kita perlu merenungkan bersama, sejauh mana persepsi, internalisasi, dan realisasi kode etik kependidikan ini, mendasari proses pembelajaran, dan pola interaksi dosen mahasiswa dalam lingkungan Lembaga Pendidikan Tinggi selama ini. Kita harus selalu ingat bawa substansi dari kode etik itu, bukanlah suatu ilmu melainkan suatu norma. Yang

terpenting adalah mentaati norma-norma itu dalam perilaku kependidikan, meskipun untuk itu harus dipahami secara kognitif. Saya mengira tidak terlalu sulit sekali melaksanakan kode etik itu. Padahal kode etik yang tidak dilaksanakan dengan konsisten, merupakan awal dari perong-rong wibawa pendidikan.

Selanjutnya kita perlu meningkatkan hubungan antara dosen dan mahasiswa dalam arti yang proposional. Dalam sejarah perkembangan pendidikan tinggi, telah terjadi beberapa kali pergeseran pola hubungan antara dosen dan mahasiswa, namun demikian hingga sekarang masih tetap disepakati pola dasar interaksi dosen dan mahasiswa berdasarkan suatu aksioma, bahwa pendidikan tinggi disebabkan oleh adanya mereka yang memiliki, mengetahui dan mampu memberikan lebih banyak dengan teknis dan tingkat pengetahuannya dosen, kepada mereka yang pengetahuannya lebih sedikit mahasiswa.⁶

Aksioma tersebut tetap disepakati dan tak pernah berubah. Karena itu mahasiswa datang di kampus untuk belajar sedangkan dosen datang untuk memberi pelajaran. Pola apapun yang mengatur interaksi antara ke duanya, di mana hubungan itu akan melemahkan tujuan interaksi itu haruslah ditolak. Pola hubungan yang telah berabad-abad berlangsung dan yang hingga sekarang dianggap ideal dalam lingkungan pendidikan tinggi adalah pola hubungan yang disebut “*loco parentis*” dengan pengertian bahwa mahasiswa itu ibarat “anak asuh” dan lembaga pendidikannya harus bertanggung jawab untuk membimbingnya dan membina perkembangan pribadinya (persis seperti yang berlaku lagi timbul peranan-peranan yang lainnya, mahasiswa-mahasiswa yang cerdas telah tumbuh menjadi “cantrik-cantrik atau santri-santri” (*apprentices*) dalam arti yang sebenar-benarnya, sedangkan yang selebihnya sekedar sebagai langganan biasa saja yang mengambil pelajaran untuk mencari gelar dan selebihnya lagi petualang-petualang atau pemisah diri yang berada di kampus, yang memisahkannya dari kegiatan-kegiatan akademis yang serius. Ketiga kelompok itu sering disebut dengan istilah (*honor student the gentlement C dan bohemians student*).⁷

Namun demikian untuk ketiga jenis kelompok mahasiswa itu tetap masih terangkum dalam pengertian *loco parentis*, yang sebelum tahun 1950 tidak suatu penyimpanganpun yang berarti terhadap implikasi dari pandangan falsafah *loco parentis* tersebut.

Apabila kita ingin meningkatkan kualitas manusia melalui kampus, maka perhatikan unuk meperbanyak kelompok mahasiswa jenis pertama (*honor students*) itulah harus lebih dipacu. Kita harus berani memberi perhatian pada mahasiswa-

⁶ Harsa Bachtiar, *Budaya dan Manusia Indonesia*, PT. Hanindita, Offset, Yogyakarta, 1985

⁷ Tisna Amijaya, D.A. *Higher Education Development In Indonesia, D.G.H.E.*, Jakarta, 1983

mahasiswa yang cerdas, bermotif dan berdedikasi tinggi pada IPTEK dan mau belajar sungguh-sungguh, dengan lebih terarah. Pelembagaan untuk memberi berbagai kemudahan bagi mereka harus betul-betul diusahakan sedangkan yang lain tidak boleh meruakan hambatan bagi pengembangan potensi kelompok pertama tadi. Dan itu harus memberikan dasar pembenaran untuk mengatur pelembagaan interaksi dosen-mahasiswa.⁸

Interaksi antara dosen mahasiswa harus didasarkan atas keterbukaan, konsultasi dan rasional argumentatif. Itu berarti bahwa dosen dan mahasiswa itu ahrus “dekat” ridak “menjarak” sehingga sesrawungan ilmiah bisa berlangsung secara intensif. Yang menjadi kendala sekarang, adalah kecenderungan untuk merancukan pengertian sopan santun dalam hubungan pribadi, dan ”sopan santun” dalam hubungan ilmiah. kecenderungan itu menyebabkan terjadinya pola interaksi yang bersifat “*feodal*” dan atau “*hirarkis*” yang tidak proposional sama sekali. Apa akibatnya? Akibatnya adalah bahwa mahasiswa kurang aktif kreatif dan memanfaatkan peluang tatap muka, ada budaya “sungkan” yang tidak pada tempatnya. Itulah yang menyebabkan terjadinya hambatan proses intelektual Inquari. Proses interaksi akademik berlangsung sepihak.⁹

Dosen memberi dan mahasiswa menerima. Proses pembelajaran terlalu bersifat kwanitatif. Proses pembelajaran terlalu bersifat kwanitatif, sebagai yang dikatakan dijejali sebanyak mungkin informal (to store the mind with knowledge). Kurang sekali kesempatan berfikir analisis dan kritis. Budaya interaksi akademik seperti harus diubah, jika ingin bahwa mahasiswa itu harus dikembangkan penalarannya (enpower the reasoning). Ada beberapa kemungkinan faktor yang menyebabkan kondisi itu, subjektif maupun objektif, tapi tak akan saya uraikan dalam tulisan ini.¹⁰

Kebebasan akademik (*academic freedom*). Yang tidak sama dengan pengertian “kebebasan mimbar” kebebasan kampus ataupun kekebalan kampus. Kebebasan akademik dilihat dari sudut potensi intelektual seseorang tidak ada batasnya, kecuali tingkat kemampuan itu snediri. Yang dapat membatasi kebebasan akademik selain potensi intelektual yang bersangkutan adalah etika. Jadi ada dua hal yang secara mendasar membatasi kebebasan akademik. Pertama potensi yang bersangkutan yang kedua adalah pertimbangan etika. Dalam wujudnya secara

⁸ Achmad Iksan, *Mahasiswa dan Kebebasan Akademik*, PT. Hanindita, Yogyakarta, 1985

⁹ Dewantoro, Hajar., “*Urgensi Inovasi Pendidikan dalam Pemberdayaan Umat*”, dalam *Pengelolaan Pendidikan Sebagai Wahana Pendidikan Muhammadiyah*”, makalah disampaikan pada Rakernas Pendidikan Muhammadiyah, di Pondok Gede, Jakarta.

¹⁰ Harsa Bachtiar, *Budaya dan Manusia Indonesia*, PT. Hanindita, Offset, Yogyakarta, 1985

struktural. Etika bisa berwujud sebagai pertimbangan atas dasar keyakinan agama, nilai-nilai kemanusiaan dan bisa juga berwujud tempat ataupun forum-forum yang tidak pada tempatnya (atau empan papan) dan cara menyampaikan (*modus of expression*) jadi apabila ada ungkapan bahwa kampus memiliki kebebasan akademik yang dimaksudkan adalah forum-forum yang bersifat ilmiah.¹¹ Pemahaman mengenai onsep tentang kebebasan akaemik ini memang masih perlu dipahami dengan benar dan mantap, oleh msyarakat dan lebih-lebih oleh civitas akademika sendiri. Ini penting agar supaya isa dicegah kemungkinan terjadinya friksi-friksi antara fihak yang bisa menghambat kemajuan ilmu pengetahuan, pembudayaan implementasi dari forum-forum ilmiah, perlu dikembangkan terus dalam proses pembelajaran para mahasiswa. Tanpa adanya kebebasan akademik bagaimana perwujudan fungsi utama perguruan tinggi akan dapat direalisasikan. Hal ini erat kaitannya dengan upaya menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat-pusat penelitian untuk mencari kebenaran (*seach of truth*). Adalah tanggung jawab moral dan fungsional pendidikan tinggi untuk pertama-tama secara benar menggunakannya.

aspek kode etik akademik lainnya yang tak kalah pentingnya adalah kejujuran dalam mengemukakan pendapat, terutama apabila pendapat itu diambil (dikutip) dari pendapat orang lain, yang telah menemukannya terlebih dahulu, selain itu menunjukkan bahwa wawasan seorang ahli dalam bidangnya itu luas, juga menunjukkan sifat-sifat efesiensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dapat dicegah terjadinya pengulangan-pengulangan yang tidak perlu. Dalam hal ini secara jujur harus kita akui, bahwa pelembagaan yang kita lakukan masih kurang mantap.¹²

Selain dari pada itu berdasarkan pengalaman saya mengikuti seminar-seminar, sering menjumpai performa diskusi-diskusi iliah yang bertele-tele dan tidak lugas. Dalam kesan saya seakan para diskusan itu masih kurang memahami kaidah-kaidah diskusi, nampak dalam kemampuan menggunakan terminologi teknis berdiskusi yang kurang baku, sehingga selalu masih diperlukan penjelasan tambahan yang sebenarnya tidak perlu. Sekedar sebagai contoh misalnya nampak dalam penataan kerangka fikir yang kurang sistematis, adanya salah konsep mengenai kata isyu, argumentasi, adanya salah konsep mengenai kata isyu, argumentasi dan evidensi dan lain-lainnya. Saya menganggap bahwa perlu ada pemahaman meskipun yang elementer mengenai kaidah konsep, terminologi, teknik mengelola diskusi, sebelum para mahasiswa itu dilibatkan dalam seminar. Atau sekurang-kurangnya diberikan

¹¹ Arifin, M, 1991, *Kapita Selekta Pendidikan*, Jakarta, Bina Aksara, 1991.

¹² Azra, Azyumardi., *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Melenium Baru*, Jakarta, Logo Macana Ilmu, 1999.

pengantar dulu mengenai metode dan teknik berseminar, sebelum kuliah “seminar” itu memasuki materi atau substansi materinya.

2. Peningkatan disiplin kerja disiplin kerja merupakan bagian dari etos kerja yang pada umumnya masih perlu dibenahi. Sebagaimana tuntutan kualitas SDM dalam GBHN tersebut di muka, tanpa peningkatan disiplin, tidak akan dapat diperoleh output pendidikan, yang memiliki budaya kerja yang menunjang proses pembangunan, yang berorientasi pada perkembangan teknologi, pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan globalisasi. Kita masih sering menjumpai kondisi budaya kerja yang kurang kondusif, bagi tumbuhnya sifat-sifat kualitas manusia Indonesia yang diinginkan. Karena sifat-sifat yang diidealkan itu, bukanlah merupakan fenomena ilmu pengetahuan cukup dimengerti secara kognitif saja, melainkan merupakan suatu proses yang panjang dalam pembentukannya, karena dia merupakan suatu sikap dan perilaku yang harus dibiasakan, diklarifikasi melalui perbuatan yang nyata, bukan sekedar dalam penataran misalnya.
3. Lebih kongkritnya peningkatan disiplin kerja itu dalam lingkungan kampus (Lembaga Pendidikan Tinggi). Masalahnya sederhana, tapi memerlukan niat dan kesungguhan, serta sistem dalam melaksanakannya. Dimulai dengan tertib perkuliahan; tepat waktu mulainya dan tepat pula waktu selesainya, mekanisme kontrol yang operasional dalam melaksanakan tugas akademik mandiri mahasiswa. Sangsi yang tegas bagi dosen yang sering absen. Kontrol yang substansial terhadap penugasan referensi wajib. Daftar presensi dosen maupun mahasiswa, yang diikuti dengan konsekuensi sanksinya, dst. Dalam hal ini yang penting adalah pengetrapan sangsi dan konsekuensi, bagi semua pihak yang melanggar. Yang lebih penting lagi pelaksanaan disiplin dalam komunikasi akademik, dalam proses belajar mengajar, misalnya sikap para dosen yang terbuka untuk dikritik. Mengakomodasi setiap pemikiran alternatif dari mahasiswa, sekalipun bertentangan dengan pendapat (dosen) sendiri. Kebiasaan untuk mendahulukan rasionalisasi, pada setiap pendapat. Membiasakan menilai kemampuan rasional mahasiswa, pada setiap keputusan nilai yang dikemukakan. Kebiasaan ini merupakan landasan bagi terciptanya kehidupan yang demokratis, yang bersumber dan sekaligus menjadi azas kehidupan islami. Disiplin kerja akademik termasuk keniatan dan kemauan serta keberanian untuk menolak “tekanan” yang mengarah kepada penyimpangan azas-azas objektivitas dalam penelitian serta perlakuan pendidikan (misalnya budaya *katabelece* dalam perilaku akademik mahasiswa), dengan dalih apapun juga, yang tidak relevan dengan azas tersebut. Salam hal terjadi suatu pelanggaran disiplin akademik, perlu ada beban abritasi profesional, untuk menghindari kesewenang-wenangan otoritas dosen, maupun penyimpangan perilaku akademik mahasiswa.

KESIMPULAN

1. Upaya untuk meningkatkan kualitas SDM, yang secara praktis harus dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi. Saya mempunyai keyakinan, bahwa yang harus didahulukan dalam pendidikan adalah suatu proses “*transfer of authority*” dari pendidik kepada anak didik. Maka jika kita tidak memiliki *authority atauwibawa* terhadap anak didik. Maka mustahil kita dapat melaksanakan tugas pendidikan itu. Sedangkan makna maupun substansi dari kewibawaan pendidik, bukanlah sekali-kali bersifat materil maupun kekuasaan fisik, melainkan berdimensi spiritual dan mental. Para pendidik tidak memiliki kekuasaan teritorial, ekonomis, maupun material dan fisik lainnya. Karena itu “kewibawaan” pendidik (Lembaga Pendidikan Tinggi).
2. Ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai bahan ajar (*subject matter*) sudah mencukupi, tidak perlu diperluas dan saya lebih memprioritaskan perbaikan atau penyesuaian budaya kerja profesional pendidikan sebagai prasyarat, bagi ditingkatkannya komponen-komponen lainnya yang bersifat penunjang, ataupun objektif dari pendidikan itu. Sifat-sifat kualitas sebagaimana dirumuskan dalam GBHN itu, pertama-tama harus dimiliki atau menjadi sifatnya para pendidik itu sendiri, sebelum mengajarkan, menanamkan atau mendidik kepada anak didiknya.
3. Kualitas SDM unggul dengan pendidikan yang berkualitas baik sikap, mental spiritual, serta perilaku sebagai upaya kearifan nilai-nilai hidup yang akan ditanamkan dalam bentuk pendidikan yang bersifat verbal kognitif, afektif dan psikomotoriknya berjalan seimbang dalam membentuk SDM unggul.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Iksan, *Mahasiswa dan Kebebasan Akademik*, PT. Hanindita, Yogyakarta, 1985
- Anthon Giddens, *Kapitalis dan Teori Sosial Modern*, UI Press., Jakarta, 1982
- Arifin, M, 1991, *Kapita Selekta Pendidikan*, Jakarta, Bina Aksara, 1991.
- Azra, Azyumardi., *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Melenium Baru*, Jakarta, Logo Macana Ilmu, 1999.
- Dewantoro, Hajar., “*Urgensi Inovasi Pendidikan dalam Pemberdayaan Umat*”, dalam *Pengelolaan Pendidikan Sebagai Wahana Pendidikan Muhammadiyah*”, makalah disampaikan pada Rakernas Pendidikan Muhammadiyah, di Pondok Gede, Jakarta.
- Daniel Bell, *The Coming of Post Industrial Society (Basic Book)*, New York, 1984
- Harsa Bachtiar, *Budaya dan Manusia Indonesia*, PT. Hanindita, Offset, Yogyakarta, 1985
- John Naisbitt, *Global Paradoks*, Bina Aksara, Jakarta, 1984
- Myron Weiner, *Dinamika Pertumbuhan*, Voice of America, Forum Lectures, 1973
- M. Khoirul Anam, From: <http://www.pendidikan.net/mk-anam.html>. Diakses tanggal 15 November 2008
- Muhaimin, Yahya [Menteri Pendidikan Nasional], 2000, “*Reformasi Pendidikan Nasional Menuju Indonesia*”, Majalah Dwiwutan BPK Penabur Jakarta,
- Munir, Abdul Mulhan, *Paradigma Intelektual Muslim, Pengantar Filsafat pendidikan Islam*, Yogyakarta, SIPRES, 1993
- Muslih Usa, *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrialisasi*, Aditya Media bekerja sama dengan Fakultas Tarbiyah UII, Yogyakarta.
- Pilip G. Alt bach, *Higher Educational In Advanced Developing Countries*, Prospects, quarterly review of Education, Vol. XII .No. 3, 1982, UNISCO.
- Phillip M. Hauser, *Urbanization, An Overview*, Willy, New York, 1985
- Rahman, Fazlur., *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*, Terj. Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka. 1987
- Soejatmoko, *The Twenty Century Challance to Learning*, Bangkok, 1984
- Suroyo, 1991, *Berbagai Persoalan Pendidikan; Pendidikan Nasional dan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Islam, Kajian tentang Konsep Pendidikan Islam, Problem dan Prospeknya, Volum 1 Tahun 1991, Fakultas Tarbiyah IAIN, Yogyakarta..

Sudiro, M. Irsyad, *Pendidikan Agama dalam Masyarakat Modern*, Seminar dan Lokakarya Nasional Revitalisasi Pendidikan Luar Sekolah dalam Masyarakat Modern, Cirebon, Tanggal 30 Agustus – 1 September 1995.

Steenbrink, Karel A. *Pesantren Madrasah Sekolah Pendidikan Islam dan Kurun Modern*, Jakarta: LP3ES, 1994

Syafii Maarif, Ahmad., 1997, "*Pendidikan Islam dan Proses Pemberdayaan Bangsa*, dalam:

Tisna Amijaya, D.A. *Higher Education Development In Indonesia, D.G.H.E.*, Jakarta, 1983